

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TINGKAT SATKER TAHUN 2022 (AUDITED)**



[kaltim.bawaslu.go.id](http://kaltim.bawaslu.go.id)



Jalan MT. Haryono No.  
128, Samarinda



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Samarinda, 27 April 2023

Kepala Satuan Kerja, Sekretariat Bawaslu  
Provinsi Kalimantan Timur



**Yusuf S.Si., M.A**

NP. 19700527 199803 1 001

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	36
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	52
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	65
F. Pengungkapan Lainnya	72
VI. Lampiran	79

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 27 April 2023

Kepala Satuan Kerja, Sekretariat Bawaslu  
Provinsi Kalimantan Timur



**Yusuf S.Si., M.A**

NIK. 19700527 199803 1 001

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Negara Per 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8.253.836. Realisasi Belanja Negara Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp48.069.525.771 atau mencapai 93,47 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp51.427.289.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.338.755.967 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp850.245.036; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.426.379.840; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp62.131.091. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp25.096.383 dan Rp3.313.696.584.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp120.547 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp48.291.370.045 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp48.291.249.498. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp8.133.289 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp48.283.116.209

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp3.672.742.759 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp48.283.116.209 dan koreksi lain-lain sebesar Rp7.500.000, serta ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp47.931.533.034 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp3.313.659.584.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	TA. 2022		% thd Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
<b>Pendapatan</b>				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	8.253.836	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>		-	<b>8.253.836</b>	<b>0</b>
<b>Belanja</b>	B.2			
Belanja Pegawai	B.3	9.990.657.000	9.333.640.366	93,42
Belanja Barang	B.4	40.557.444.000	37.871.778.665	93,38
Belanja Modal	B.5	879.188.000	864.106.740	98,29
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>51.427.289.000</b>	<b>48.069.525.771</b>	<b>93,47</b>

## II. NERACA

### SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NERACA

**PER 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021**

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Belanja dibayar di muka (Prepaid)	C.1	437.250.000	159.000.000
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2	408.869.509	416.369.509
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3	(2.044.348)	(2.081.848)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.4	406.825.161	414.287.661
Persediaan	C.5	6.169.875	17.949.750
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>850.245.036</b>	<b>591.237.411</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Peralatan dan Mesin	C.6	9.870.201.196	9.483.257.624
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.7	30.500.000	30.500.000
Aset Tetap Lainnya	C.8	199.033.900	199.033.900
Akumulasi Penyusutan	C.9	(7.673.355.256)	(6.818.048.332)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>2.426.379.840</b>	<b>2.894.743.192</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Tak Berwujud	C.10	294.339.000	328.919.000
Aset Lain-lain	C.11	872.801.940	872.801.940
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(1.105.009.849)	(995.072.400)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>62.131.091</b>	<b>206.648.540</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>3.338.755.967</b>	<b>3.692.629.143</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	25.096.383	19.886.384
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>25.096.383</b>	<b>19.886.384</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>25.096.383</b>	<b>19.886.384</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.14	3.313.659.584	3.672.742.759
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>3.313.659.584</b>	<b>3.672.742.759</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>3.338.755.967</b>	<b>3.692.629.143</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022  
dan 31 DESEMBER 2021**

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	120.547	1
<b>Jumlah Pendapatan</b>		120.547	1
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D.2	9.340.898.880	8.008.955.983
Beban Persediaan	D.3	33.355.025	31.161.925
Beban Barang dan Jasa	D.4	21.369.424.378	18.918.607.482
Beban Pemeliharaan	D.5	979.909.171	849.492.250
Beban Perjalanan Dinas	D.6	15.220.571.451	9.541.318.148
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.347.248.640	1.604.241.465
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(37.500)	2.081.848
<b>Jumlah Beban</b>		48.291.370.045	38.955.859.101
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(48.291.249.498)</b>	<b>(38.955.859.100)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		8.133.289	217.080.052
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.133.289	217.080.052
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>8.133.289</b>	<b>217.080.052</b>
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	D.9	<b>8.133.289</b>	<b>217.080.052</b>
<b>Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(48.283.116.209)</b>	<b>(38.738.779.048)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNB	D.10	-	-
Beban Luar Biasa		-	-
<b>SURPLUS/(DEFISIT) LO</b>	D.11	<b>(48.283.116.209)</b>	<b>(38.738.779.048)</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022  
dan 31 DESEMBER 2021**

*(Dalam Rupiah)*

<b>Uraian</b>	<b>Catatan</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Ekuitas Awal	E.1	3.672.742.759	22.792.453.400
Surplus/Defisit LO	E.2	(48.283.116.209)	(38.738.779.048)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	(7.500.000)	(8.730.755.730)
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		-	(12.385.861)
Koreksi Lain-Lain	E.3.1	(7.500.000)	(8.718.369.869)
Transaksi Antar Entitas	E.4	47.931.533.034	28.349.824.137
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.5	(359.083.175)	(19.119.710.641)
<b>Ekuitas Akhir</b>	E.6	<b>3.313.659.584</b>	<b>3.672.742.759</b>

## **A. PENJELASAN UMUM**

### **A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan**

#### **Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur**

*Dasar  
Hukum dan  
Profil Entitas*

1. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
  1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan pencalonan gubernur;
  3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan calon gubernur;
  4. penetapan calon gubernur;
  5. pelaksanaan kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang. Pemilu lanjutan. dan Pemilu susulan; dan
  11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- b. mengelola. memelihara. dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
  - c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
  - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
  - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
  - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi. sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan

yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bawaslu Provinsi dapat:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

## 2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian, yaitu :

- a) Kepala Bagian Administrasi;
- b) Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat;

- c) Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan, dan Aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan

peristiwa itu terjadi. tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### *Kebijakan Akuntansi*

#### **A.4. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

### *Pendapatan- LRA*

#### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan

berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Pendapatan-LO* (2) **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja* (3) **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Aset*

#### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### *Aset Lancar*

#### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan

sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak	50%

	tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus. ketinggalan jaman. tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
  - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
  - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
Software/Aplikasi Komputer	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang
 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, *Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Per 31 Desember 2022 telah dilakukan 11 (sebelas) kali revisi yaitu:

1. *Revisi ke-01, dengan tanggal revisi 09 Desember 2021*
2. *Revisi ke-02, dengan tanggal revisi 13 April 2022*
3. *Revisi ke-03, dengan tanggal revisi 07 Juli 2022*
4. *Revisi ke-04, dengan tanggal revisi 08 Juli 2022*
5. *Revisi ke-05, dengan tanggal revisi 11 Agustus 2022*
6. *Revisi ke-06, dengan tanggal revisi 08 September 2022*
7. *Revisi ke-07, dengan tanggal 11 Oktober 2022*
8. *Revisi ke-08, dengan tanggal 25 Oktober 2022*
9. *Revisi ke-09, dengan tanggal 03 November 2022*
10. *Revisi ke-10, dengan tanggal 30 November 2022*
11. *Revisi ke-11, dengan tanggal 27 Desember 2022*

Revisi anggaran sesuai Surat Sekretaris Jenderal nomor 3110/PR.03.01/SJ/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 perihal Automatic Adjustment/Pencadangan Anggaran. Untuk Bawaslu

Provinsi Kalimantan Timur, Pencadangan Anggaran adalah sebesar Rp1.468.812.000.

Revisi anggaran ke-2 sesuai surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ke Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur nomor 0175/KU.00/KI/04/2022 Perihal usulan revisi Rencana Penarikan Dana Hal.III DIPA dan Revisi Satker. Perubahan tersebut dirincikan berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja.

Revisi anggaran ke-3 dan ke-4 sesuai surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ke Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur nomor 0373/KU.00/KI/07/2022 Perihal usulan revisi Anggaran. Di mana usulan revisi anggaran ini dengan mekanisme revisi yaitu revisi POK dan penyesuaian halaman III DIPA.

Revisi anggaran ke-5 Perihal Pecah DIPA Satker Baru Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yaitu Bawaslu Kota Samarinda sebesar Rp1.029.740.000

Uraian	2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi ke-5
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	8.399.910.000	8.053.486.000
Belanja Barang	27.458.276.000	26.800.741.000
Belanja Modal	578.609.000	552.828.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>36.436.795.000</b>	<b>35.407.055.000</b>

Revisi anggaran ke-6 sesuai dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-254/MK.2/2022 tanggal 08 Agustus 2022 Hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) Tahap I dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Badan Pengawas Pemilihan Umum (BA 115) untuk Tambahan Anggaran Bawaslu TA 2022.

Uraian	2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi ke-6
<b>Belanja</b>		

Belanja Pegawai	8.399.910.000	8.053.486.000
Belanja Barang	27.458.276.000	38.005.136.000
Belanja Modal	578.609.000	644.628.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>36.436.795.000</b>	<b>46.703.250.000</b>

Revisi anggaran ke-7 Perihal Penambahan Anggaran atau ABT II untuk pemenuhan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2024 serta penambahan gaji dan operasional untuk pemenuhan kekurangan gaji dan operasional.

Uraian	2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi ke-7
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	8.399.910.000	9.990.657.000
Belanja Barang	27.458.276.000	40.557.004.000
Belanja Modal	578.609.000	879.628.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>36.436.795.000</b>	<b>51.427.289.000</b>

Revisi anggaran ke-8 merupakan revisi tingkat Kanwil untuk melakukan revisi RPD Halaman 3 DIPA serta revisi satker ABT I dan ABT II.

Revisi anggaran ke-9 merupakan revisi tingkat DJA untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dinas dan kegiatan tahapan yang dapat terlaksana

Revisi anggaran ke-10 merupakan revisi tingkat Kanwil untuk memperbaiki RPD Halaman 3 DIPA dan revisi satker.

Revisi anggaran ke-11 merupakan revisi untuk melakukan pemutakhiran KPA dan penyelesaian pagu minus.

Uraian	2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi ke-11
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	8.399.910.000	9.990.657.000
Belanja Barang	27.458.276.000	40.557.004.000
Belanja Modal	578.609.000	879.628.000

<b>Jumlah Belanja</b>	<b>36.436.795.000</b>	<b>51.427.289.000</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp8.253.836*

### **B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.253.836. Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan jasa giro dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

<b>Uraian</b>	<b>2022</b>		
	<b>Estimasi (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	120.547	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	41	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	8.133.248	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>8.253.836</b>	-

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp120.547 merupakan pendapatan jasa giro rekening hibah operasional Bawaslu Kota Balikpapan.

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp41 merupakan koreksi atas akun potongan beban pembulatan gaji pegawai untuk kekurangan gaji bulan Desember 2021 dan Januari 2022.

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu Rp8.133.248 terdiri dari setor kelebihan pembayaran perjalanan dinas TA 2021 yang terdiri dari:

Uraian	Tanggal Setor	NTPN	Nominal (Rp)
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Pembinaan Tindak Lanjut Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan Pemilu di Bawaslu Berau tgl 20 s.d. 22 Des 2021 a.n. Ebin Marwi	11/05/2022	1027B2G4V70R3HSC	16.000
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan RI pada kegiatan Rakor Evaluasi Program Kerja Tahunan Anggaran 2021 dan Pemantapan Persiapan Pengawasan tahapan pemilu serentak 2024 di Jakarta tanggal 11 s.d. 13 Desember 2021	11/05/2022	664088N3E11HTVF7	180.000
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan RI Pada Rakor Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021 dan Pemantapan Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu Serentak 2024 di Jakarta 11 s.d. 13 Desember 2021 a.n. Hari Dermanto	11/05/2022	6DB1C6U8EBSP41CD	584.305
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan Bawaslu RI Kegiatan Seminar dan Lokakarya Nasional Penguatan Literasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada di Jakarta tanggal 15 s.d. 17 Desember 2021 a.n. Imam Sutanto	11/05/2022	6EB067QLU6F5HFNG	458.000
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan RI Rakor Evaluasi Program Kerja TA 2021 & Pemantapan Persiapan Pengawasan Tahapan 2024 dan Rakor Evaluasi Bidang Advokasi dokumentasi di Jakarta tanggal 11 s.d. 15 Desember 2021 a.n. M. Ramli	11/05/2022	00C567QLU6F5H9VO	1.260.608

Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan RI Rakor Evaluasi Program Kerja TA 2021 dan Pemantapan Persiapan Pemilu serentak 2024 di Jakarta tanggal 11 s.d. 13 Desember 2021 a.n. Yusuf, S.Si., MA	11/05/2022	347880N9VHS29COI	921.355
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Pembinaan Aparatur hukum dalam menghadapi dampak hukum atas Penegakan tindak pidana Pemilu yg dibebaskan MA di Balikpapan tanggal 27 s.d. 28 Desember 2021 a.n. M.Ramli	11/05/2022	E5BA42G4V70R3JCQ	51.240
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan RI kegiatan Rakor Evaluasi program Kerja TA 2021 dan Pemantapan Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu serentak 2024 ke Jakarta tanggal 11 s.d. 13 Desember 2021 a.n. Ebin Marwi, S.H.I	11/05/2022	416E761QUHACMSK6	441.000
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka menghadiri undangan RI pada Kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Program Penanganan Pelanggaran tahun 2022 tanggal 13 s.d. 15 Desember 2021 a.n. Ebin Marwi,S.H.I., M.H	18/05/2022	04FA061QUHAK481A	1.360.000
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan RI kegiatan Seminar dan Lokakarya Nasional Penguatan Literasi Penyelesaian Sengketa proses Pemilu/Pilkada	11/05/2022	763337QLU6F5HKQA	962.700
Pengembalian Inkin PPNPN Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Bulan Desember 2021	08/03/2022	618037QLU6943DT2	398.040

Pengembalian Tahap 2 Perjalanan Dinas Supervisi Keuangan terkait Pertanggungjawaban anggaran TUP ke Bawaslu Kabupaten Paser (12 s.d. 14 April 2019) a.n. Andreas Kelan	18/02/2022	E4D8155DEMFAFTUV	500.000
Pengembalian Tahap 3 Perjalanan Dinas Supervisi Keuangan terkait Pertanggungjawaban Anggaran TUP ke Bawaslu Kab. paser (12 s.d. 14 April 2019) a.n. Andreas Kelan	29/04/2022	876B661QUHATKCUO	500.000
Pengembalian Tahap 4 Perjalanan Dinas Supervisi Keuangan terkait Pertanggungjawaban Anggaran TUP ke Bawaslu Paser (12 s.d. 14 April 2019) a.n. Andreas Kelan	18/07/2022	274A655DEMU3SBAB	500.000
<b>Total</b>			<b>8.133.248</b>

Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022 mengalami penurunan 94,78% dibandingkan 31 Desember 2021. Penurunan terjadi dikarenakan Penerimaan Kembali atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu di TA 2022 lebih kecil dibandingkan dengan TA 2021.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Des 2022</b>	<b>Realisasi 31 Des 2021</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	120.547	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	41	14.716.504	(99,97)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8.133.248	143.273.552	(94,32)

<b>Jumlah</b>	<b>8.253.836</b>	<b>157.990.056</b>	<b>(94,78)</b>
---------------	------------------	--------------------	----------------

*Realisasi Belanja  
Negara  
Rp48.069.525.771*

## **B.2 Belanja**

Realisasi Belanja instansi Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp48.069.525.771 atau 93,47% dari anggaran belanja sebesar Rp51.427.289.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

### *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2022*

Uraian	31 Desember 2022		% Realisasi Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	9.990.657.000	9.333.640.366	93,42
Belanja Barang	40.557.444.000	37.871.778.665	93,38
Belanja Modal	879.188.000	864.106.740	98,28
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>51.427.289.000</b>	<b>48.069.525.771</b>	<b>93,47</b>
<b>Jumlah</b>	<b>51.427.289.000</b>	<b>48.069.525.771</b>	<b>93,47</b>

Dibandingkan dengan 31 Desember 2021, realisasi belanja Per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 26,29% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada belanja modal yaitu sebesar 641,79% dibanding tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan adanya tambahan anggaran Prioritas Nasional untuk Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota.

### *Perbandingan Realisasi Belanja*

#### *Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021*

Uraian	Realisasi 31 Des 2022	Realisasi 31 Des 2021	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	9.333.640.366	8.005.798.797	34,65
Belanja Barang	37.871.778.665	29.940.797.459	26,49
Belanja Modal	864.106.740	116.489.998	641,79
<b>Jumlah</b>	<b>48.069.552.771</b>	<b>38.063.086.254</b>	<b>26,29</b>

*Realisasi Belanja  
Pegawai  
Rp9.333.640.366*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.333.640.366 dan Rp8.005.798.797. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 16,84% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Kenaikan belanja pegawai disebabkan oleh adanya:

1. Penambahan jumlah pegawai berasal dari perekrutan CPNS Umum Tahun 2021 dan CPNS Kedinasan dari STAN;
2. Adanya komponen 50% tunjangan kinerja pada pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) PNS dan CPNS; dan
3. Kenaikan besaran THR Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibandingkan Tahun 2021.

*Perbandingan Belanja Pegawai  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Des 2022</b>	<b>Realisasi 31 Des 2021</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.627.707.242	857.655.219	89,79
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	6.588.591.000	6.384.179.100	3,20
Belanja Lembur	34.509.000	61.495.000	(43,88)
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.092.936.580	702.469.656	55,58
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>9.343.743.822</b>	<b>8.005.798.975</b>	<b>16,71</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(10.103.456)	(178)	5675998,88
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.333.640.366</b>	<b>8.005.798.797</b>	<b>16,84</b>

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.333.640.366 dipergunakan untuk:

1. Pembayaran gaji PNS dan CPNS bulan Januari s.d. Desember 2022;
2. Pembayaran tunjangan struktural dan fungsional bulan Januari s.d. Desember 2022;
3. Pembayaran uang makan PNS dan CPNS bulan Januari s.d. Desember 2022;
4. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur bulan Januari s.d. Desember 2022;
5. Pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bulan Januari s.d. Desember 2022;
6. Pembayaran tunjangan kinerja PNS dan CPNS bulan Januari s.d. Desember 2022;
7. Pembayaran THR dan Gaji 13 PNS dan CPNS Tahun 2022;
8. Pembayaran THR dan Gaji 13 Uang Kehormatan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2022;
9. Pembayaran THR dan Gaji 13 Uang Kehormatan Bawaslu Provinsi tahun 2022.

*Realisasi Belanja  
Barang  
Rp37.871.778.665*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp37.871.778.665 dan Rp29.940.797.459. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 26,29% dari Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2021. Kenaikan paling signifikan terjadi pada Belanja Barang Non Operasional yaitu sebesar 104,53%, hal tersebut karena belanja bahan pada Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan. Selain itu peningkatan juga terjadi pada Belanja Honor Output Kegiatan terdapat realisasi honorarium pokja antara lain honorarium pokja Gakkumdu periode Oktober s.d Desember 2022, honorarium pokja rekrutmen panwascam, dan adanya realisasi honorarium pokja PPID pada Bawaslu Kab/Kota.

*Perbandingan Belanja Barang  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2022</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2021</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Barang Operasional	14.181.780.637	14.180.730.398	0,01
Belanja Barang Non Operasional	2.298.812.870	1.123.938.166	104,53
Belanja Barang Persediaan	21.575.150	41.448.975	(47,95)
Belanja Jasa	5.170.988.824	3.975.257.580	30,08
Belanja Pemeliharaan	979.909.171	849.492.250	15,35
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	15.224.910.595	9.791.708.390	55,49
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>37.877.977.247</b>	<b>29.962.575.759</b>	<b>26,42</b>
Pengembalian Belanja	(6.198.582)	(21.778.300)	(71,54)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>37.871.778.665</b>	<b>29.940.797.459</b>	<b>26,49</b>

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.871.778.665 dipergunakan untuk:

1. Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu;
2. Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu;
3. Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu;
4. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif;
5. Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran;
6. Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa;
7. Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan;
8. Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
9. Layanan Operasional Panwaslu Kecamatan.

Semua realisasi belanja barang dari bulan Januari s.d. Desember bersumber dari Anggaran Rupiah Murni (RM). Dari realisasi belanja barang sebesar Rp37.871.778.665 terdapat realisasi belanja barang

yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp272.365.466 yang dipergunakan untuk:

1. Pengadaan masker dan *hand sanitizer*;
  2. Pembayaran lisensi aplikasi *video conference* bulan Januari s.d. Desember 2022;
  3. Biaya paket data komunikasi bulan Januari s.d. Desember 2022.
- Per 31 Desember 2022, realisasi akun khusus belanja atas dampak dan penanganan pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut

*Realisasi Akun Khusus Belanja Covid-19  
Per 31 Desember 2022*

<b>Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	334.960.000	270.845.466	80,86
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	1.875.000	1.520.000	81,07
<b>Jumlah</b>		<b>336.835.000</b>	<b>272.365.466</b>	<b>80,86</b>

*Realisasi*

*Belanja Modal*

*Rp864.106.740*

***B.5 Belanja Modal***

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp864.106.740 dan Rp116.489.998. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 641,79% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya tambahan anggaran Prioritas Nasional untuk Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2022</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2021</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	864.106.740	116.489.998	641,79
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal. Jalan. Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>864.106.740</b>	<b>116.489.998</b>	<b>641,79</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>864.106.740</b>	<b>116.489.998</b>	<b>641,79</b>

### ***B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin***

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp864.106.740 dan Rp116.489.998. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 641,79% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi ini digunakan untuk:

1. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
2. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran;
3. Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Kab/kota;
4. Dukungan Perangkat Aplikasi Pengawasan Pemilu.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin*

*Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Des 2022</b>	<b>Realisasi 31 Des 2021</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	864.106.740	116.489.998	641,79
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>864.106.740</b>	<b>116.489.998</b>	<b>641,79</b>

Pembelian Peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

*Tabel Mutasi Pembelian*

## Peralatan dan Mesin TA 2022

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah)	1	221.500.000
3.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	3	40.875.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	10	67.400.000
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	10	17.835.000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	5	14.100.000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	2	19.400.000
3.05.02.06.002	Televisi	12	125.027.400
3.05.02.06.008	Sound System	1	4.000.000
3.05.02.06.016	Mic Conference	1	7.675.000
3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	1	1.000.000
3.06.01.02.165	Camera Conference	1	18.967.600
3.07.01.08.128	Proyektor Romand Complet	1	6.450.000
3.08.01.41.194	Personal Computer	9	79.891.740
3.10.01.02.001	P.C Unit	3	23.095.000
3.10.01.02.002	Laptop	13	162.800.000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Computer)	21	54.090.000
<b>Total</b>			<b>864.106.740</b>

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Belanja Dibayar  
Di Muka  
(Prepaid)  
Rp437.250.000*

**C.1 Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid)**

Saldo Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid) Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp437.250.000 dan Rp159.000.000. Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid) sebesar Rp437.250.000 terdiri dari:

1. Sewa Kendaraan Roda 4 Bawaslu Kabupaten Berau dengan total nilai sewa sebesar Rp300.000.000 dengan periode sewa 01 Desember 2022 s.d. 01 Desember 2023. Beban sewa di tahun 2022 adalah sebesar Rp25.000.000, dengan masa sewa 01 Desember 2022 s.d. 31 Desember 2022, sehingga saldo akrual Belanja Dibayar di Muka adalah sebesar Rp275.000.000; dan

2. Sewa Gedung Bawaslu Kota Balikpapan dengan total nilai sewa sebesar Rp324.500.000 dengan periode sewa 11 Juli 2022 s.d 11 Juli 2023. Beban sewa di tahun 2022 adalah sebesar Rp162.250.000, dengan masa sewa 11 Juli 2022 s.d. 31 Desember 2022, sehingga saldo akrual Belanja Dibayar di Muka adalah sebesar Rp162.250.000.

*Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR  
Rp408.869.509*

### **C.2 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Nilai Bagian lancar tagihan tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp408.869.509 dan Rp416.369.509. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut merupakan temuan sisa dana hibah Pilkada serentak tahun 2015 yang belum dikembalikan ke kas daerah oleh Panwaslu Kota Samarinda per 31 Desember 2022 senilai Rp408.869.509.

Mutasi kurang Aset Lain-Lain berupa Jurnal Balik atas Setoran atau Tindak Lanjut Pengembalian Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	NTPN/No.STS	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Disetorkan ke Kas Daerah oleh Panwas Kota Samarinda	Telah disetorkan melalui Bank Kaltim dengan No. Rekening 0011300114	10-Jan-2022	1.500.000
2	Disetorkan ke Kas Daerah oleh Panwas Kota Samarinda	Telah disetorkan melalui Bank Kaltim dengan No. Rekening 0011300114	07-Feb-2022	2.000.000
3	Disetorkan ke Kas Daerah oleh Panwas Kota Samarinda	Telah disetorkan melalui Bank Kaltim dengan No. Rekening 0011300114	13-Apr-2022	2.000.000
4	Disetorkan ke Kas Daerah oleh	Telah disetorkan melalui Bank Kaltim	16-Jun-2022	2.000.000

	Panwas Kota Samarinda	dengan No. Rekening 0011300114		
<b>Total</b>				7.500.000

### **C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

*Penyisihan  
Piutang – Bagian  
Lancar Tagihan  
TP/TGR  
Rp2.044.348*

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian lancar tagihan tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.044.348. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dihitung berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.06/2010, yaitu ditetapkan paling sedikit 5‰ (lima permil) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian lancar tagihan tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.044.348. Nilai tersebut merupakan 5‰ (lima permil) dari nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yaitu Rp408.869.509.

*Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR  
(Netto)  
Rp406.825.161*

#### **C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)**

Nilai tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp406.825.161. Piutang tagihan TP adalah Piutang yang timbul dari akibat tuntutan yang dikenakan Bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara. TP dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundangan. Nilai tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) sebesar Rp406.825.161 merupakan hasil dari nilai tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp408.869.509 dikurangi nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp2.044.348.

*Persediaan  
Rp6.169.875*

#### **C.5 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp6.169.875 dan Rp17.949.750.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Jenis</b>	<b>31 Des 2022</b>	<b>31 Des 2021</b>
Barang Konsumsi	5.409.875	15.577.750
Persediaan Lainnya	760.000	2.372.000
<b>Jumlah</b>	<b>6.169.875</b>	<b>17.949.750</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, yang terdiri dari:

No	Kode Barang	Jenis Barang	Nominal (Rp)
----	-------------	--------------	--------------

1	1010301001	Alat Tulis	920.975
2	1010301003	Penjepit Kertas	70.025
3	1010301004	Penghapus/Korektor	118.475
4	1010301006	Ordner dan Map	199.025
5	1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	95.625
6	1010301010	Alat Perekat	274.450
7	1010301012	Staples	207.450
8	1010301013	Isi Staples	56.875
9	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	136.125
10	1010302002	Berbagai Kertas	318.600
11	1010302004	Amplop	75.725
12	1010304004	Tinta/Toner Printer	1.689.250
13	1010304010	Mouse	221.500
14	1010306010	Batu Baterai	155.775
15	1010399999	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	870.000
16	1010401999	Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	760.000
<b>Total</b>			<b>6.169.875</b>

Mutasi nilai Persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 1 Jan 2022</b>	<b>17.949.750</b>
Mutasi Tambah	
Pembelian – Barang Konsumsi	20.055.150
Pembelian – Persediaan Lainnya	1.520.000
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>21.575.150</b>
Mutasi Kurang	
Pemakaian – Barang Konsumsi	30.223.025
Pemakaian – Persediaan Lainnya	3.132.000
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>33.355.025</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	<b>6.169.875</b>

*Peralatan dan  
Mesin  
Rp9.870.201.196*

### **C.6 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

dan 31 Desember 2021 adalah Rp9.870.201.196 dan Rp9.483.257.624.

Rincian peralatan dan mesin yang ada, adalah sebagai berikut:

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nominal (Rp)
3.01.03.04.001	Transportable Generating Set	9	216.298.000
3.02.01.01.003	Station Wagon	1	398.300.000
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah)	10	3.361.800.000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	3	49.384.500
3.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16)	2	3.960.000
3.05.01.01.004	Mesin Ketik Listrik	1	1.980.000
3.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	1	19.000.000
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	55	155.501.110
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	3	10.346.000
3.05.01.04.003	Rak Besi	49	79.110.000
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	27	47.684.728
3.05.01.04.007	Brankas	8	38.103.000
3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	4	8.750.000
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television	10	148.237.800
3.05.01.05.010	White Board	6	7.650.000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	1	11.700.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	26	272.911.375
3.05.01.05.052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	5.000.000
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	19	31.411.500
3.05.01.05.081	Papan Pengumuman	1	5.500.000
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	101	199.477.000

3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	197	330.220.895
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	469	552.532.452
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	21	54.623.000
3.05.02.01.005	Sice	16	68.590.907
3.05.02.01.006	Bangku Panjang Besi/Metal	10	5.000.000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	26	102.399.987
3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	1	3.795.000
3.05.02.03.999	Alat Pembersih Lainnya	2	1.154.000
3.05.02.04.004	A.C Split	130	429.567.920
3.05.02.04.006	Kipas Angin	3	5.295.000
3.05.02.05.002	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	460.000
3.05.02.06.002	Televisi	12	122.078.400
3.05.02.06.008	Sound System	13	125.959.500
3.05.02.06.016	Mic Conference	11	107.070.000
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	10	4.950.000
3.05.02.06.031	Pataka	6	8.910.000
3.05.02.06.077	Bendera Negara	5	2.475.000
3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	1	1.000.000
3.05.02.06.087	Neon Box	1	2.750.000
3.06.01.01.088	Voice Recorder	20	21.962.432
3.06.01.02.043	Stabilizing Amplifier	1	7.976.428
3.06.01.02.128	Camera Digital	11	105.547.112
3.06.01.02.165	Camera Conference	3	42.017.600
3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attendance	10	48.237.500
3.06.03.47.002	Genset	1	13.000.000
3.07.01.01.171	Thermometer Gun	10	28.500.000

3.10.01.02.001	P.C Unit	153	1.136.406.698
3.10.01.02.002	Laptop	82	773.309.304
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	156	314.851.998
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal)	38	362.550.050
3.10.02.04.002	Router	1	6.000.000
3.10.02.04.003	Hub	1	1.485.000
3.10.02.04.006	Repeater and Transceiver	1	2.500.000
3.10.02.04.026	Access Point	4	4.920.000
<b>Total</b>			<b>9.870.201.196</b>

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2022</b>	<b>9.483.257.624</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	864.106.740
Reklasifikasi Masuk	127.216.740
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>991.323.480</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Transfer Keluar	477.163.168
Reklasifikasi Keluar	127.216.740
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>604.379.908</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>9.870.201.196</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(7.661.107.339)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	<b>2.209.093.857</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa pembelian. terdiri atas:

*Tabel Mutasi Pembelian  
Peralatan dan Mesin TA 2022*

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah)	1	221.500.000

3.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	3	40.875.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	10	67.400.000
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	10	17.835.000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	5	14.100.000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	2	19.400.000
3.05.02.06.008	Sound System	1	4.000.000
3.05.02.06.002	Televisi	12	125.027.400
3.05.02.06.016	Mic Conference	1	7.675.000
3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	1	1.000.000
3.06.01.02.165	Camera Conference	1	18.967.600
3.07.01.08.128	Proyektor Romad Complet	1	6.450.000
3.08.01.41.194	Personal Computer	9	79.891.740
3.10.01.02.001	P.C Unit	3	23.095.000
3.10.01.02.002	Laptop	13	162.800.000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Computer)	21	54.090.000
<b>Total</b>			<b>864.106.740</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa reklasifikasi masuk, terdiri atas:

*Tabel Mutasi Reklasifikasi Masuk*

*Peralatan dan Mesin TA 2022*

Kode Barang	Jenis BMN	Nilai Perolehan (Rp)
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Computer)	40.875.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	79.891.740
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	6.450.000
<b>Total</b>		<b>127.216.740</b>

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa transfer keluar, terdiri atas:

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
3.01.03.04.001	Transportable Generating Set	1	9.466.000
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	4	9.970.000
3.05.01.04.003	Rak Besi	3	3.000.000
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	1	1.500.000
3.05.01.04.007	Brandkas	1	3.950.000
3.05.01.04.015	Locker	1	3.248.100
3.05.01.05.007	CCTV – Camera Control Television System	1	14.800.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	3	31.870.000
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1.783.500
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	7	15.860.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	22	35.294.500
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	52	63.720.000
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	6	12.779.400
3.05.02.01.005	Sice	2	7.687.500
3.05.02.04.004	A.C. Split	12	35.880.000
3.05.02.06.002	Televisi	1	9.949.000
3.05.02.06.008	Sound System	1	9.920.000
3.05.02.06.016	Mic Conference	1	9.900.000
3.06.01.02.128	Camera Digital	1	9.100.000
3.06.02.07.005	Finger Print Time and Attendance Access Control System	1	4.800.000
3.07.01.01.171	Thermometer Gun	1	2.850.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	12	92.930.580
3.10.01.02.001	Lap Top	6	50.605.588
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.453.000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	33.846.000

<b>Total</b>		<b>477.163.168</b>
--------------	--	--------------------

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa reklasifikasi keluar, terdiri atas:

*Tabel Mutasi Reklasifikasi Keluar*

*Peralatan dan Mesin TA 2022*

Kode Barang	Jenis BMN	Nilai Perolehan (Rp)
3.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	40.875.000
3.08.01.41.194	Personal Computer	79.891.740
3.07.01.08.128	Proyektor Romad Complet	6.450.000
<b>Total</b>		<b>127.216.740</b>

*Jalan, Jaringan,  
dan Irigasi  
Rp30.500.000*

**C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp30.500.000 dan Rp30.500.000. Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Nominal (Rp)
Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	22.500.000
Instalasi Lain-lain	8.000.000
<b>Total</b>	<b>30.500.000</b>

Instalasi Lain-Lain merupakan Aset berupa instalasi jaringan internet yang perolehannya berasal dari transfer masuk dari pusat.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2022</b>	<b>30.500.000</b>
Mutasi Tambah	
Penambahan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi Kurang	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>30.500.000</b>

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(12.247.917)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>18.252.083</b>

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp199.033.900*

### C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp199.033.900 dan Rp199.033.900. Aset tetap lainnya ini merupakan renovasi atas gedung kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebagaimana rincian berikut

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2022</b>	<b>199.033.900</b>
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>199.033.900</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>199.033.900</b>

*Akumulasi  
Penyusutan  
Rp7.673.355.256*

### C.9 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp7.673.355.256 dan Rp6.818.048.332. Nilai Akumulasi Penyusutan tersebut terdiri atas:

<b>Keterangan</b>	<b>31 Des 2022 (Rp)</b>	<b>31 Des 2021 (Rp)</b>
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.661.107.339	6.806.896.248
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.247.917	11.152.084
<b>Total</b>	<b>7.673.355.256</b>	<b>6.818.048.332</b>

*Aset Tak  
Berwujud  
Rp294.339.000*

### C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp294.339.000 dan Rp328.919.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2022</b>	<b>328.919.000</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Transfer Keluar	34.580.000
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>34.580.000</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>294.339.000</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(244.265.835)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	<b>50.073.165</b>

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa reklasifikasi keluar, terdiri atas:

Kode Barang	Jenis BMN	Nilai Perolehan (Rp)
8.01.01.01.001	Software Komputer	34.580.000
<b>Total</b>		<b>34.580.000</b>

*Aset Lain-lain*  
*Rp872.801.940*

### **C.11 Aset lain-lain**

Aset lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing masing sebesar Rp872.801.940 dan Rp872.801.940. Aset lain-lain ini terdiri dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, belum dilakukan usulan penghapusan dan usulan pemindahtanganan atas BMN yang dihentikan penggunaannya.

Rincian dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>31 Des 2022</b>	<b>31 Des 2021</b>
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp818.476.940	Rp818.476.940
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp54.325.000	Rp54.325.000
<b>Total</b>	<b>Rp872.801.940</b>	<b>Rp872.801.940</b>

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan terdiri atas:

<b>Kode Barang</b>	<b>Jenis BMN</b>	<b>Jumlah Barang</b>	<b>Nominal (Rp)</b>
3.01.03.04	Transportable Generating Set	1	9.466.000
3.05.01.03	Mesin Fotocopy (folio)	1	80.000.000
3.05.01.04	Lemari Besi/Metal	1	2.500.000
3.05.01.04	Rak Besi	4	5.000.000
3.05.01.04	Filing Cabinet Besi	1	1.500.000
3.05.01.04	Brankas	2	7.950.800
3.05.01.05	CCTV	1	20.000.000
3.05.01.05	White Board	1	750.000
3.05.01.05	LCD Projector/Infocus	6	60.649.999
3.05.01.05	Focusing Screen/Layar LCD Projector)	2	2.590.000
3.05.02.01	Meja Kerja Besi/Metal	4	7.870.000
3.05.02.01	Meja Kerja Kayu	29	68.780.000
3.05.02.01	Kursi Besi/Metal	89	86.467.000
3.05.02.03	Mesin Penghisap Debu/vacuum cleaner	1	3.500.000
3.05.02.04	A.C Split	10	29.880.000
3.05.02.06	Televisi	1	3.500.000
3.05.02.06	Camera Video	1	14.850.000
3.05.02.06	Gordyin/kray	1	16.720.000

3.05.02.06	Bendera Negara	1	495.000
3.06.01.01	Uninterruptible Power Supply (ups)	6	12.870.000
3.06.01.01	Digital Led Running Text	1	14.650.000
3.06.01.04	Mesin Barcode	1	5.000.000
3.06.02.01	Pesawat Telephone	1	1.884.300
3.10.01.02	P.C Unit	16	112.256.400
3.10.01.02	Laptop	10	94.025.441
3.10.02.03	Printer / peralatan personal komputer	73	104.678.000
3.10.02.03	Scanner / peralatan personal komputer	5	45.669.000
3.10.02.04	Router	1	2.475.000
3.10.02.04	Repeater And Transciever	1	2.500.000
<b>Total</b>		<b>271</b>	<b>818.476.940</b>

Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan terdiri atas:

Kode Barang	Jenis BMN	Jumlah Barang	Nominal (Rp)
8.01.01.01	Software Komputer	2	54.325.000
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>54.325.000</b>

Mutasi transaksi terhadap Aset lain-lain pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 1 Januari 2022</b>	<b>872.801.940</b>
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi Kurang	
Jurnal Balik atas Setoran atau Tindak Lanjut Pengembalian Aset Lain-Lain	-
Jurnal Balik dari Aset Lain-Lain ke tagihan tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>872.801.940</b>

*Akumulasi**Penyusutan dan  
Aset Lainnya**Rp1.105.009.849***C.12 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp1.105.009.849 dan Rp995.072.400. Rincian akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya terdiri atas:

Keterangan	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
<b>A. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(806.419.014)	(759.027.398)
<b>Jumlah</b>	<b>(806.419.014)</b>	<b>(759.027.398)</b>
<b>B. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya</b>		
Akumulasi Amortisasi Software	(244.265.835)	(181.720.002)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(54.325.000)	(54.325.000)
<b>Jumlah</b>	<b>(298.590.835)</b>	<b>(236.045.002)</b>
<b>Total Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya</b>	<b>(1.105.009.849)</b>	<b>(995.072.400)</b>

*Utang Kepada**Pihak Ketiga**Rp25.096.383***C.13 Utang Kepada Pihak Ketiga**

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp25.096.383 dan Rp19.886.384. Utang kepada pihak ketiga ini terdiri dari:

Keterangan	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	10.415.700	3.157.186
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	14.680.683	16.729.198

<b>Total</b>	<b>25.096.383</b>	<b>19.886.384</b>
--------------	-------------------	-------------------

Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp10.415.700 merupakan pembayaran Uang Kehormatan 1 (satu) orang Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sesuai Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 1736.1/HK.01.01/K1/12/2022 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur a.n. Victor Haris Pradana.

Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp14.680.683 merupakan pembayaran tagihan listrik, air, dan koran untuk bulan Desember 2022 yang tagihannya baru muncul di bulan Januari 2023. Rincian belanja barang yang masih harus dibayar terlampir pada Form Daftar Utang Pihak Ketiga/Tunggakan Tahun Anggaran 2022.

### *Ekuitas*

*Rp3.313.659.584*

### **C.14 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.313.659.584 dan Rp3.672.742.759. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp3.338.755.967, dan kewajiban sebesar Rp25.096.383. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### *Pendapatan PNPB*

*Rp120.547*

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp120.547 dan Rp1. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>31 Des 2022</b>	<b>31 Des 2021</b>	<b>Kenaikan / Penurunan (%)</b>
Pendapatan Jasa Giro	120.547	1	12054600
<b>Jumlah</b>	<b>120.547</b>	<b>1</b>	<b>12054600</b>

Realisasi Pendapatan Jasa Giro per 31 Desember 2022 sebesar Rp120.547 merupakan pendapatan jasa giro rekening hibah operasional Bawaslu Kota Balikpapan bulan Agustus 2022.

Realisasi Pendapatan Jasa Giro per 31 Desember 2021 sebesar Rp1 merupakan selisih antara jurnal penyesuaian jasa giro rekening PDHL Bawaslu Kota Samarinda TA 2020 yang belum disetor sebesar Rp1.883.264 dengan penyeteroran jasa giro rekening PDHL Bawaslu Kota Samarinda TA 2020 sebesar Rp1.883.265.

Tidak terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022.

*Beban Pegawai*  
*Rp9.340.898.880*

#### **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.340.898.880 dan Rp8.008.955.983. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan Beban Pegawai sebesar 16,63% dibanding dengan

periode yang berakhir pada 31 Desember 2021. Kenaikan beban pegawai disebabkan oleh:

1. Kenaikan Tunjangan Hari Raya Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
2. Penambahan CPNS rekrutmen tahun 2022.

Uraian	Realisasi 31 Des 2022	Realisasi 31 Des 2021	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	986.048.754	492.794.746	100,09
Beban Pembulatan Gaji PNS	17.369	8.281	109,75
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	36.398.858	32.271.056	12,79
Beban Tunj. Anak PNS	8.984.582	6.492.068	38,39
Beban Tunj. Struktural PNS	94.710.000	80.490.000	17,67
Beban Tunj. Fungsional	22.484.000	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	130.059.633	39.053.284	233,03
Beban Tunj. Beras PNS	44.031.360	26.505.720	66,12
Beban Uang Makan PNS	243.810.500	159.717.250	52,65
Beban Tunjangan Umum PNS	58.005.000	23.480.000	147,04
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	6.599.006.700	6.384.179.100	3,36
Beban Uang Lembur	34.509.000	61.495.000	(43,88)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.092.936.580	702.469.656	55,58
<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>9.351.002.336</b>	<b>8.008.956.161</b>	<b>16,76</b>
<b>Pengembalian Beban Pegawai</b>	<b>(10.103.456)</b>	<b>(178)</b>	<b>5675998,88</b>
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>9.340.898.880</b>	<b>8.008.955.983</b>	<b>16,63</b>

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja pegawai dibandingkan jumlah beban pegawai per 31 Desember 2022. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

<b>Mutasi tambah</b>	
<b>Belanja Pegawai (LRA)</b>	<b>9.333.640.366</b>
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	10.415.700
<b>Jumlah Mutasi tambah</b>	<b>10.415.700</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Jurnal Balik – Kekurangan Gaji PNS	3.157.186

<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>3.157.186</b>
<b>Jumlah Beban Pegawai per 31 Des 2022</b>	<b>9.340.898.880</b>

*Beban Persediaan*  
*Rp33.355.025*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp33.355.025 dan Rp31.161.925. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan mengalami kenaikan sebesar 7,04% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 terdapat peningkatan pemakaian barang persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan*  
*Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Des 2022</b>	<b>Realisasi 31 Des 2021</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Beban Persediaan Konsumsi	30.223.025	21.818.925	38,52
Beban Persediaan Lainnya	3.132.000	9.343.000	(66,48)
<b>Jumlah</b>	<b>33.355.025</b>	<b>31.161.925</b>	<b>7,04</b>

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang persediaan dibandingkan jumlah beban persediaan per 31 Desember 2022. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

<b>Saldo Awal</b>	
Barang Konsumsi	15.577.750
Persediaan Lainnya	2.372.000
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Belanja Barang Persediaan – Barang Konsumsi	20.055.150
Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid 19	1.520.000

<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>21.575.150</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Sisa Persediaan Per 31 Desember 2022	
1. Barang Konsumsi	5.409.875
2. Persediaan Lainnya	760.000
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>6.169.875</b>
<b>Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2022</b>	<b>33.355.025</b>

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

*Beban Barang dan Jasa Rp21.369.424.378*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp21.369.424.378 dan Rp18.918.607.482. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 terjadi kenaikan Beban Barang dan Jasa sebesar 12,95% dibanding dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021. Kenaikan paling signifikan terjadi pada beban honor output kegiatan yaitu sebesar 594,99%, hal tersebut terjadi karena terdapat realisasi honorarium pokja antara lain honorarium pokja Gakkumdu periode Oktober s.d Desember 2022, honorarium pokja rekrutmen panwascam, dan adanya realisasi honorarium pokja PPID pada Bawaslu Kab/Kota. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Uraian Jenis Beban</b>	<b>Realisasi 31 Des 2022</b>	<b>Realisasi 31 Des 2021</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Beban Keperluan Perkantoran	13.150.307.141	12.922.656.393	1,76

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.950.075	851.050	129,14
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	466.320.000	639.674.000	(27,10)
Beban Barang Operasional Lainnya	292.712.955	227.736.955	28,53
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19	270.845.466	253.712.000	6,75
Beban Bahan	1.206.207.870	676.837.166	78,21
Beban Honor Output Kegiatan	1.083.070.000	155.840.000	594,99
Beban Barang Non Operasional Lainnya	9.000.000	30.261.000	(70,26)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	535.000	24.587.513	(97,82)
Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19	-	16.200.000	(100)
Beban Langganan Listrik	400.966.874	355.495.159	12,79
Beban Langganan Telepon	13.920.000	41.767.177	(66,67)
Beban Langganan Air	64.021.359	110.094.069	(41,78)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	396.076	16.750.000	(97,64)
Beban Sewa	4.137.831.000	3.358.920.000	23,19
Beban Jasa Profesi	273.200.000	42.950.000	536,09
Beban Jasa – Penanganan Pandemi Covid 19	-	48.750.000	(100)
<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>21.371.283.816</b>	<b>18.923.082.482</b>	<b>12,94</b>
<b>Pengembalian Beban</b>	<b>(1.859.438)</b>	<b>(4.475.000)</b>	<b>(58,45)</b>
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b>21.369.424.378</b>	<b>18.918.607.482</b>	<b>12,95</b>

Dari jumlah beban barang dan jasa sebesar Rp21.369.424.378 terdapat jumlah beban barang dan jasa yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp270.845.466 yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran lisensi *video conference* Januari s.d. Desember 2022;
2. Pengadaan masker/*hand sanitizer* untuk kegiatan maupun persediaan;
3. Biaya paket data komunikasi bulan Januari s.d. Desember 2022.

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang dan jasa dibandingkan jumlah beban barang dan jasa per 31 Desember 2022. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>21.349.722.893</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Belanja Barang dan Jasa yang Masih Harus Dibayar	14.680.683
Beban Sewa dari Sewa Tahun yang Lalu	159.000.000
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>173.680.683</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Jurnal balik atas beban tahun yang lalu	16.729.198
Belanja Barang Dibayar di muka	437.250.000
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>453.979.198</b>
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Des 2022</b>	<b>21.369.424.378</b>

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp979.909.171*

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp979.909.171 dan Rp849.492.250. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Per 31 Desember 2022 terdapat kenaikan Beban Pemeliharaan sebesar 15,35% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021. Kenaikan terdapat pada beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar 91,57% yang dikarenakan penambahan anggaran pemeliharaan dan kenaikan belanja pemeliharaan mengikuti harga wajar pasar. Rincian beban pemeliharaan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Uraian Jenis Beban</b>	<b>Realisasi 30 Sep 2022</b>	<b>Realisasi 30 Sep 2021</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	313.951.516	163.885.000	91,57

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	665.957.655	685.607.250	(2,87)
<b>Jumlah</b>	<b>979.909.171</b>	<b>849.492.250</b>	<b>15,35</b>

Tidak terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022.

### *Beban Perjalanan*

#### *Dinas*

*Rp15.220.571.451*

### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.220.571.451 dan Rp9.541.318.148. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2021, Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 59,52%, kenaikan paling signifikan terjadi pada Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota yaitu sebesar 643,32%, hal tersebut dikarenakan banyaknya realisasi kegiatan Paket Meeting Dalam Kota di Semester II Tahun Anggaran 2022. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Beban Perjalanan Dinas*

*Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Uraian Jenis Beban</b>	<b>Realisasi 31 Des 2022</b>	<b>Realisasi 31 Des 2021</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Beban Perjalanan Dinas Biasa	9.523.532.097	7.607.592.499	25,18
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.435.988.663	470.707.997	205,07
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.959.536.240	532.680.000	643,32

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	305.853.595	947.640.952	(67,72)
<b>Jumlah Beban Kotor</b>	<b>15.224.910.595</b>	<b>9.558.621.448</b>	<b>59,28</b>
<b>Pengembalian Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>(4.339.144)</b>	<b>(17.303.300)</b>	<b>(74,92)</b>
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>15.220.571.451</b>	<b>9.541.318.148</b>	<b>59,52</b>

Tidak terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja perjalanan dinas dibandingkan jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2022.

*Beban*

*Penyusutan dan*

*Amortisasi*

*Rp1.347.248.640*

#### **D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.347.248.640 dan Rp1.604.241.465. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>Realisasi 31 Des 2022</b>	<b>Realisasi 31 Des 2021</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.207.426.358	1.462.661.324	(17,45)
Beban Penyusutan Jaringan	1.095.833	1.095.833	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	47.391.616	43.358.473	9,30

<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>1.255.913.807</b>	<b>1.507.115.630</b>	<b>(14,63)</b>
Beban Amortisasi Software	91.334.833	97.125.835	(5,96)
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>91.334.833</b>	<b>97.125.835</b>	<b>(5,96)</b>
<b>Jumlah Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.347.248.640</b>	<b>1.604.241.465</b>	<b>(16,02)</b>

*Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp37.500)*

#### **D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp37.500) dan Rp2.081.848. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar (Rp37.500) merupakan selisih dari beban penyisihan piutang tak tertagih per Desember 2021 sebesar Rp2.081.848 atas nilai piutang sebesar Rp416.369.509 dengan beban penyisihan piutang tak tertagih per Desember 2022 sebesar Rp2.044.348 atas nilai piutang sebesar Rp408.869.509.

*Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp8.133.289*

#### **D.9 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp8.133.289 dan Rp217.080.052. Rincian Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional  
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Des 2022</b>	<b>Realisasi 31 Des 2021</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8.133.289	217.080.052	(96,25)

<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>8.133.289</b>	<b>217.080.052</b>	<b>(96,25)</b>
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah Beban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>8.133.289</b>	<b>217.080.052</b>	<b>(96,25)</b>

Surplus dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp8.133.289 yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp41 merupakan koreksi atas akun potongan beban pembulatan gaji pegawai untuk kekurangan gaji bulan Desember 2021 dan Januari 2022; dan
- b. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp8.133.248 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Tanggal Setor</b>	<b>NTPN</b>	<b>Nominal (Rp)</b>
Kelebihan Pembayaran Perjadi dalam rangka Pembinaan Tindak Lanjut Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan Pemilu di Bawaslu Berau tgl 20 s.d. 22 Des 2021 a.n. Ebin Marwi	11/05/2022	1027B2G4V70R3HSC	16.000
Kelebihan Pembayaran Perjadi dalam rangka Menghadiri Undangan Ri pada kegiatan Rakor Evaluasi Program Kerja Tahunan Anggaran 2021 dan Pemantapan Persiapan Pengawasan tahapan pemilu serentak 2024 di Jakarta tanggal 11 s.d. 13 Desember 2021	11/05/2022	664088N3E11HTVF7	180.000

Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan RI Pada Rakor Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021 dan Pemantapan Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu Serentak 2024 di Jakarta 11 s.d. 13 Desember 2021 a.n. Hari Dermanto	11/05/2022	6DB1C6U8EBSP41CD	584.305
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan Bawaslu RI Kegiatan Seminar dan Lokakarya Nasional Penguatan Literasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada di Jakarta tanggal 15 s.d. 17 Desember 2021 a.n. Imam Sutanto	11/05/2022	6EB067QLU6F5HFNG	458.000
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan RI Rakor Evaluasi Program Kerja TA 2021 & Pemantapan Persiapan Pengawasan Tahapan 2024 dan Rakor Evaluasi Bidang Advokasi dokumentasi di Jakarta tanggal 11 s.d. 15 Desember 2021 a.n. M. Ramli	11/05/2022	00C567QLU6F5H9VO	1.260.608
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan RI Rakor Evaluasi Program Kerja TA 2021 dan Pemantapan Persiapan Pemilu serentak 2024 di Jakarta tanggal 11 s.d. 13 Desember 2021 a.n. Yusuf, S.Si., MA	11/05/2022	347880N9VHS29COI	921.355
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka	11/05/2022	E5BA42G4V70R3JCQ	51.240

Pembinaan Aparatur hukum dalam menghadapi dampak hukum atas Penegakan tindak pidana Pemilu yg dibebaskan MA di Balikpapan tanggal 27 s.d. 28 Desember 2021 a.n. M.Ramli			
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan RI kegiatan Rakor Evaluasi program Kerja TA 2021 dan Pemantapan Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu serentak 2024 ke Jakarta tanggal 11 s.d. 13 Desember 2021 a.n. Ebin Marwi, S.H.I	11/05/2022	416E761QUHACMSK6	441.000
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka menghadiri undangan RI pada Kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Program Penanganan Pelanggaran tahun 2022 tanggal 13 s.d. 15 Desember 2021 a.n. Ebin Marwi,S.H.I., M.H	18/05/2022	04FA061QUHAK481A	1.360.000
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan RI kegiatan Seminar dan Lokakarya Nasional Penguatan Literasi Penyelesaian Sengketa proses Pemilu/Pilkada	11/05/2022	763337QLU6F5HKQA	962.700
Pengembalian Inkin PPNPN Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Bulan Desember 2021	08/03/2022	618037QLU6943DT2	398.040
Pengembalian Tahap 2 Perjalanan Dinas Supervisi Keuangan terkait Pertanggungjawaban anggaran TUP ke Bawaslu Kabupaten Paser (12 s.d. 14 April 2019) a.n.	18/02/2022	E4D8155DEMFAFTUV	500.000

Andreas Kelan			
Pengembalian Tahap 3 Perjalanan Dinas Supervisi Keuangan terkait Pertanggungjawaban Anggaran TUP ke Bawaslu Kab. Paser (12 s.d. 14 April 2019) a.n. Andreas Kelan	29/04/2022	876B661QUHATKCUO	500.000
Pengembalian Tahap 4 Perjalanan Dinas Supervisi Keuangan terkait Pertanggungjawaban Anggaran TUP ke Bawaslu Paser (12 s.d. 14 April 2019) a.n. Andreas Kelan	18/07/2022	274A655DEMU3SBAB	500.000
<b>Total</b>			<b>8.133.248</b>

**Pos Luar Biasa****Rp0****D.10 Pos Luar Biasa**

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

**Defisit LO****Rp48.283.116.209****D.11 SURPLUS (DEFISIT) LO**

Defisit LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp48.283.116.209 dan Rp38.738.779.048.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****Ekuitas Awal****Rp3.672.742.759****E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp3.672.742.759 dan Rp22.792.453.400.

**Defisit LO****Rp48.283.116.209****E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar

Rp48.283.116.209 dan Rp38.738.779.048. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang*

*Menambah /*

*Mengurangi Ekuitas*

*Rp7.500.000*

*Koreksi Nilai Aset*

*Non Revaluasi*

*Rp0*

*Koreksi Lain Lain*

*Rp7.500.000*

### **E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**

Koreksi yang Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.500.000 dan Rp8.730.755.730, yaitu sebagai berikut:

#### **E.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp12.835.861.

#### **E.3.2 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.500.000 dan Rp8.718.369.869. Koreksi lain-lain tersebut merupakan pengembalian dana hibah ke kas daerah dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kota Samarinda TA 2015 sebesar Rp7.500.000 dari total keseluruhan senilai Rp448.469.509 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	NTPN/No. STS	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Disetorkan ke Kas Daerah oleh Panwas Kota Samarinda	Telah disetorkan melalui Bank Kaltim dengan No. Rekening 0011300114	10-Jan-2022	1.500.000
2	Disetorkan ke Kas Daerah oleh Panwas Kota Samarinda	Telah disetorkan melalui Bank Kaltim dengan No. Rekening 0011300114	07-Feb-2022	2.000.000
3	Disetorkan ke Kas Daerah oleh Panwas Kota Samarinda	Telah disetorkan melalui Bank Kaltim dengan No. Rekening 0011300114	13-Apr-2022	2.000.000
4	Disetorkan ke Kas	Telah disetorkan	16-Jun-2022	2.000.000

	Daerah oleh Panwas Kota Samarinda	melalui Bank Kaltim dengan No. Rekening 0011300114		
<b>Total</b>				<b>7.500.000</b>

*Transaksi Antar Entitas Rp47.931.533.034*

#### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp47.931.533.034 dan Rp28.349.824.137. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

##### *Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
Ditagihkan ke Entitas Lain	47.548.025.771
Diterima dari Entitas Lain	(8.253.836)
Transfer Keluar	(129.738.901)
Pengesahan Hibah Langsung	550.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(28.500.000)
<b>Jumlah</b>	<b>47.931.533.034</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp8.253.836 sedangkan DKEL sebesar Rp47.548.025.771.

DDEL sebesar Rp8.253.836 ini terdiri dari:

##### *Diterima dari Entitas Lain*

<b>Diterima dari Entitas Lain</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
-----------------------------------	--------------------

Pendapatan Jasa Giro	120.547
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	41
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	8.133.248
<b>Total</b>	<b>8.253.836</b>

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp120.547 merupakan pendapatan jasa giro rekening hibah operasional Bawaslu Kota Balikpapan bulan Agustus 2022.

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp41 merupakan koreksi atas akun potongan beban pembulatan gaji pegawai untuk kekurangan gaji bulan Desember 2021 dan Januari 2022.

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu terdiri dari:

<b>Uraian</b>	<b>Tanggal Setor</b>	<b>NTPN</b>	<b>Nominal (Rp)</b>
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Pembinaan Tindak Lanjut Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan Pemilu di Bawaslu Berau tgl 20 s.d. 22 Des 2021 a.n. Ebin Marwi	11/05/2022	1027B2G4V70R3HSC	16.000
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan Ri pada kegiatan Rakor Evaluasi Program Kerja Tahunan Anggaran 2021 dan Pemantapan Persiapan Pengawasan tahapan pemilu	11/05/2022	664088N3E11HTVF7	180.000

serentak 2024 di Jakarta tanggal 11 s.d. 13 Desember 2021			
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan RI Pada Rakor Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021 dan Pemantapan Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu Serentak 2024 di Jakarta 11 s.d. 13 Desember 2021 a.n. Hari Dermanto	11/05/2022	6DB1C6U8EBSP41CD	584.305
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan Bawaslu RI Kegiatan Seminar dan Lokakarya Nasional Penguatan Literasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada di Jakarta tanggal 15 s.d. 17 Desember 2021 a.n. Imam Sutanto	11/05/2022	6EB067QLU6F5HFNG	458.000
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan RI Rakor Evaluasi Program Kerja Ta 2021 & Pemantapan Persiapan Pengawasan Tahapan 2024 dan Rakor Evaluasi Bidang Advokasi dokumentasi di Jakarta tanggal 11 s.d. 15 Desember 2021 a.n. M. Ramli	11/05/2022	00C567QLU6F5H9VO	1.260.608
Kelebihan Pembayaran Perjadin dalam rangka Menghadiri Undangan RI Rakor Evaluasi Program Kerja TA 2021 dan Pemantapan Persiapan Pemilu serentak 2024 di Jakarta tanggal 11 s.d. 13 Desember	11/05/2022	347880N9VHS29COI	921.355

2021 a.n. Yusuf, S.Si., MA			
Kelebihan Pembayaran Perjadi dalam rangka Pembinaan Aparatur hukum dalam menghadapi dampak hukum atas Penegakan tindak pidana Pemilu yg dibebaskan MA di Balikpapan tanggal 27 s.d. 28 Desember 2021 a.n. M.Ramli	11/05/2022	E5BA42G4V70R3JCQ	51.240
Kelebihan Pembayaran Perjadi dalam rangka Menghadiri Undangan RI kegiatan Rakor Evaluasi program Kerja TA 2021 dan Pemantapan Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu serentak 2024 ke Jakarta tanggal 11 s.d. 13 Desember 2021 a.n. Ebin Marwi, S.H.I	11/05/2022	416E761QUHACMSK6	441.000
Kelebihan Pembayaran Perjadi dalam rangka menghadiri undangan RI pada Kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Program Penanganan Pelanggaran tahun 2022 tanggal 13 s.d. 15 Desember 2021 a.n. Ebin Marwi,S.H.I., M.H	18/05/2022	04FA061QUHAK481A	1.360.000
Kelebihan Pembayaran Perjadi dalam rangka Menghadiri Undangan RI kegiatan Seminar dan Lokakarya Nasional Penguatan Literasi Penyelesaian Sengketa proses Pemilu/Pilkada	11/05/2022	763337QLU6F5HKQA	962.700
Pengembalian Inkin PPNPN Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Bulan Desember 2021	08/03/2022	618037QLU6943DT2	398.040

Pengembalian Tahap 2 Perjalanan Dinas Supervisi Keuangan terkait Pertanggungjawaban anggaran TUP ke Bawaslu Kabupaten Paser (12 s.d. 14 April 2019) a.n. Andreas Kelan	18/02/2022	E4D8155DEMFAFTUV	500.000
Pengembalian Tahap 3 Perjalanan Dinas Supervisi Keuangan Terkait Pertanggungjawaban Anggaran TUP ke Bawaslu Kab. paser (12 s.d. 14 April 2019) a.n. Andreas Kelan	29/04/2022	876B661QUHATKCUO	500.000
Pengembalian Tahap 4 Perjalanan Dinas Supervisi Keuangan terkait Pertanggungjawaban Anggaran TUP ke Bawaslu Paser (12 s.d. 14 April 2019) a.n. Andreas Kelan	18/07/2022	274A655DEMU3SBAB	500.000
<b>Total</b>			<b>8.133.248</b>

DKEL sebesar Rp47.548.025.771 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari

*Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain*

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Pegawai	9.333.640.366
Belanja Barang	37.871.778.665
Belanja Modal	864.106.740
Pengesahan Belanja Hibah	(521.500.000)
<b>Jumlah</b>	<b>47.548.025.771</b>

**E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas**

Penurunan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp359.083.175 dan Rp19.119.710.641.

*Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas*

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
Surplus / Defisit LO	(48.283.116.209)	(38.738.779.048)

*Penurunan*

*Ekuitas*

*Rp359.083.175*

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas	(7.500.000)	(8.730.755.730)
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	(12.385.861)
Koreksi Lain-Lain	(7.500.000)	(8.718.369.869)
Transaksi Antar Entitas	47.931.533.034	28.349.824.137
<b>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</b>	<b>(359.083.175)</b>	<b>(19.119.710.641)</b>

*Ekuitas Akhir*

*Rp3.313.659.584*

## **E.6 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.313.659.584 dan Rp3.672.742.759.

Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar 3.672.742.759 dikurangi penurunan ekuitas sebesar Rp359.083.175.

## **F. Pengungkapan Penting Lainnya**

### **F.1 Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bawaslu. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam Provinsi Kelas B yang terdiri atas 3 (tiga) bagian dan kelompok jabatan fungsional. Per 31 Desember 2022 telah diisi 2 (dua) Kepala Bagian dan 3 (tiga) Jabatan Fungsional.

Pada 01 Juli 2022 dan 15 Juli 2022, telah dilantik Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nomor SK</b>
1	Hesty Sudiarni, S.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	0093/KP.04.00/KI/07/ 2022
2	A.Andri Purwanta, S.Sos	Plt Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bontang	0097/KP.04.00/KI/07/ 2022

3	Lely Febriyanti	Plt Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bontang	0156/KP.04.00/KI/12/ 2022
---	-----------------	--	------------------------------

## **F.2 Pejabat Perbendaharaan**

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 2 Januari 2020 telah ditunjuk Pejabat Pengelola Satuan Kerja dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Yusuf, S.Si., M.A.

Sepanjang tahun 2022, telah terdapat beberapa pergantian pejabat perbendaharaan dengan rincian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Semula</b>	<b>Menjadi</b>	<b>Nomor SK</b>	<b>Tanggal SK</b>
1	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Balikpapan	Eka Sari Handayani	Ichro Faisyal	0020/KP.04. 00/KI/01/2 022	14 Januari 2022
2	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Bontang	Sulistiyo, S.E	Tyagita Osa Ayuningtyas , S.ST	0016/KP.04. 00/KI/01/2 022	11 Januari 2022
3	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Bontang	Tyagita Osa Ayuningtyas, S.ST	Raden Dion Erik Perdata, A.Md. A.B	0061/KP.04. 00/KI/02/2 022	17 Februari 2022
4	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten. Kutai Barat	Eko Budi Triwanto, S.E.	Hesty Sudiarni, S.P	0093/KP.04. 00/KI/07/2 022	01 Juli 2022

5	Pejabat Pembuat Komitmen Kota Bontang	Abdul Azis, S.E.	Athanasius Andri Purwanta, S.Sos	0098/KP.04.00/KI/07/2022	18 Juli 2022
---	---------------------------------------	------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------

### F.3 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0534.A/KU.01.00/KI/11/2022 tentang Penggantian dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 tanggal 09 November 2022 telah ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu:

No	Jabatan	Semula	Menjadi	Nomor SK	Tanggal SK
1	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Athanasius Andri Purwanta, S.Sos	Muhammad Teguh Adiguna Weynand, S.E.	0534.A/KU.01.00/KI/11/2022	09 November 2022

### F.4 Rekening yang Dikelola

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengelola rekening yang berasal dari 2 (dua) sumber anggaran, yaitu rupiah murni dan hibah dalam negeri.

Rekening yang masih aktif dikelola per 31 Desember 2022 adalah *virtual account* yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni, dengan rincian terlampir:

Uraian	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
RM Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	Mandiri	BPG 046 BAWASLU PROV KALTIM	810012684171000
RM Bawaslu Kabupaten Berau	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KAB BERAU	810012684171002

RM Bawaslu Kabupaten Bontang	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KT BONTANG	8100126864171003
RM Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB KUBAR	8100126864171004
RM Bawaslu Kutai Kartanegara	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB KUKAR	8100126664171005
RM Bawaslu Kabupaten Kutai Timur	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB KUTIM	8100126864171006
RM Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Mandiri	BP 046 BAWASLU KB MAHULU	8100126864171007
RM Bawaslu Kabupaten Paser	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB PASER	8100126864171008
RM Bawaslu Kota Balikpapan	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KT BALIKPAPAN	8100126864171001
RM Bawaslu Kota Penajam Paser Utara	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KB PPU	8100126864171009
RM Bawaslu Kota Samarinda	Mandiri	BPP 046 BAWASLU KT SAMARINDA	8100126864171010

Per 31 Desember 2022, terdapat Rekening Penerimaan Dana Hibah Langsung (PDHL) atas Bawaslu Kabupaten/Kota yang mana peruntukan hibah adalah untuk pembelian kendaraan operasional roda 4 dan sewa kendaraan operasional roda 4, rincian atas rekening tersebut sebagaimana terlampir:

<b>Uraian</b>	<b>Bank</b>	<b>Nama Rekening</b>	<b>Nomor Rekening</b>	<b>Nomor Reg.</b>	<b>Tanggal Pembukaan</b>
---------------	-------------	----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------

Hibah Bawaslu Kota Balikpapan	Mandiri	RPL 046 PDHL BAWASLU KALTIM UTK 28FSEP6A	1490014294039	28FSEP 6A	21 Juli 2022
Hibah Bawaslu Kabupaten Berau	Mandiri	RPL 046 PDHL BAWASLU PROV KALTIM UNTUK 2UAVQZ8A	1490014227633	2UAVQZ 8A	23 Juni 2022

## F.5 Pengungkapan Lainnya

### a. Pengembalian Sisa Dana Hibah Pilkada TA 2015

Pada tanggal 25 Mei 2022, telah dilaksanakan pertemuan antara perwakilan Inspektorat Wilayah III Bawaslu Republik Indonesia dengan Ibu Meity Landemeyke Torar selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kota Samarinda TA 2015 terkait pengembalian sisa dana hibah Pilkada TA 2015 tidak sesuai ketentuan. Pada pertemuan tersebut, Ibu Meity bersedia untuk menyetorkan kekurangan Penyetoran Sisa Dana Hibah Pilkada ke Kas Daerah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hal ini telah diserahkan Sertipikat Tanah Hak Milik No. 00527 yang terletak di Desa Batu Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara atas nama Pemegang Hak Alexander Agustinus Rottie (tanggal lahir

2 Agustus 1972) dengan luas 7.321 m<sup>2</sup> (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi).

**a. Kekurangan Pembayaran Gaji Induk PNS**

Terkait dengan pembayaran gaji induk Pegawai Negeri Sipil, terdapat kekurangan pembayaran pada bulan Januari s.d Februari 2021 a.n. Athanasius Andri Purwanta, S.Sos senilai Rp6.749.600. Kekurangan gaji tersebut disebabkan karena terkendala pada aplikasi GPP. Slip Gaji mengenai kekurangan gaji induk tersebut terdapat pada bagian lampiran laporan ini.

**b. Belum Terbayarnya Uang Kehormatan Bulan Desember Tahun 2022 sebanyak 1 (Satu) Orang**

Terdapat uang kehormatan bulan Desember Tahun 2022 yang belum dibayarkan sebesar Rp10.415.700 untuk 1 (satu) orang a.n. Viktor Haris Pradana yang merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1736.1/HK.01.01/K1/12/2022 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Keterlambatan pembayaran tersebut dikarenakan Kelengkapan dokumen pembayaran baru diterima di bulan Januari Tahun 2023.

**F.5 Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan melakukan penilaian terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas. Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengendalian Intern

Tingkat Proses/Transaksi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.

## LAMPIRAN

Lampiran 1 Slip Gaji Kekurangan Gaji Induk PNS Januari s.d. Februari 2021

**Nomor : 1**                      **SLIP GAJI**

**BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Pembayaran : Kekurangan Gaji Kekurangan Gaji Januari Sd**

**Pegawai : Athanasius Andri Purwanta, S.Sos (197705022005021004)**

Penghasilan		Potongan	
Gaji Pokok	7.257.800	Pot. Beras	0
T.Istri/Suami	0	IWP	580.624
T.Anak	0	Bpjs	72.578
T.Umum	0	Bpjs Lain	0
T.Ta. Umum	0	Pot. PPh	0
T.Papua	0	Sewa RmH	0
T.Terpencil	0	Tunggakan	0
T.Struktur	0	Utang	0
T.Fungsi	0	Pot. Lain	0
T.Lain	0	Taperum	0
T.Bulat	162	Jml. Pot	653.202
T.Beras	144.840		
T.Pajak	0	Jml. Bersih	<b>6.749.600</b>
<b>Jml.Kotor</b>	<b>7.402.802</b>		

BADAN PENGAWAS PEMILU

DAFTAR GAJI PEGAWAI GOLONGAN III  
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur

PEMBAYARAN : KEKURANGAN GAJI KEKURANGAN GAJI JANUARI SD FEBRUARI 2021

LEMBAR KE : 1

NO. URT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI GOLONGAN	STA. KAWIN JML/ ANAK JIWA	PENGHASILAN						POTONGAN					JUMLAH BERSIH YANG DIBAYARKAN	TANDA TANGAN	
			GAJI. POKOK	TUN. UMUM	TUNJ. JABATAN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KHUSUS PAJAK	JUMLAH PENGH. KOTOR	POT. BERAS	IWP BPJS BPJS LAIN	PAJAK PENGH. SILAN	SEWA RMH TUNGGAKAN	JUMLAH POTONGAN			
1.	Athanasius Andri Purwanta, S.Sos LHR.02-05-1977 NIP.197705022005021004 PNS GOL.IIIId	1000	3.628.900	0	980.000	72.420	0	4.681.391	0	290.312 91.279	0	0	0	381.591	4.299.800	1480018219074
	NIP.197705022005021004	1000	0	0	980.000	0	0	980.000	0	0	0	0	0	0	980.000	1480018219074
	NIP.197705022005021004	1000	3.628.900	0	0	72.420	0	3.701.391	0	290.312 91.279	0	0	0	381.591	3.319.800	
	KEKURANGAN ( 2 X ) GAJI JANUARI SD FEBRUARI 2021	1000	7.257.800	0	0	144.840	0	7.402.802	0	580.624 72.578	0	0	0	653.202	6.749.600	1480018219074
	JUMLAH LEMBAR KE : 1	1	7.257.800	0	0	144.840	0	7.402.802	0	580.624 72.578	0	0	0	653.202	6.749.600	
	Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur	1	7.257.800	0	0	144.840	0	7.402.802	0	580.624 72.578	0	0	0	653.202	6.749.600	

Samarinda , 19 AGUSTUS 2022  
PPABP

Raden Dion Erik Perdata, A.Md.A.B  
NIP 199608102019021001

LEMBAR INI MEMUJAT : 1 PEGAWAI + 0 ISTRI/SUAMI + 0 ANAK = 1 JIWA